



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JI. URIP SUMOHARJO NO.47 Telp (0321) 8613448
JOMBANG

**KEPUTUSAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JOMBANG**

Nomor : 103/ 09 /415.45/2024

T E N T A N G

**INDIKATOR KINERJA UTAMA/INDIVIDU
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JOMBANG**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JOMBANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , perlu menetapkan ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama/ Individu dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8D) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2020. (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 12/D);
2. Peraturan Bupati Jombang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan , Sususnan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang;

3. Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

Menatapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan untuk :
 - a. Memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja dengan baik ;
 - b. Memperoleh ukuran keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran startegis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu sebagaimana diktum KESATU dipergunakan untuk :
 - a. Perencanaan Jangka Menengah;
 - b. Perencanaan tahunan
 - c. Pengukuran kinerja sasaran berkala;
 - d. Pelaporan kinerja
 - e. Evaluasi kinerja
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jombang
Pada Tanggal 2 Januari 2024

KEPALA BAKESBANGPOL



Drs. ANWAR, M.KP
NIP. 197104181992011004

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JOMBANG

- TUGAS POKOK :** Membantu bupati melaksanakan tugas dibidang Kesatuan bangsa dan politik
- FUNGSI :**
- a Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;

- f Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik;
- g Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET	SUMBER DATA
1.	Penanganan konflik	Jumlah konflik ideologi	Jumlah konflik ideologi tahun (n)	0 kasus	Laporan perkembangan situasi
		Jumlah konflik Politik dan organisasi kemasyarakatan	Jumlah konflik Politik dan organisasi kemasyarakatan tahun (n)	0 kasus	
		Jumlah konflik ekonomi dan sosial budaya	Jumlah konflik ekonomi dan sosial budaya tahun (n)	0 kasus	
		Jumlah rekomendasi kebijakan pimpinan daerah terkait ATHG	Jumlah rekomendasi kebijakan pimpinan daerah terkait ATHG tahun (n)	15 rekomendasi	
	Definisi Operasional Penanganan Konflik adalah memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik serta membangun sistem peringatan dini.	Konflik Ideologi ideologi <ul style="list-style-type: none">- Radikal kanan biasanya berkedok agama yang menggunakan bendera-bendera agama atau atas nama agama.- Sedangkan radikal kiri itu gerakan radikal dalam hal pluralisme serta sekulerisme dalam beragama (faham komunis)- Pengaruh asing dan globalisasi- Globalisasi dapat membawa masuk ide-ide, nilai-nilai, dan budaya dari luar membawa perubahan yang tajam dalam pandangan masyarakat- Perbedaan pandangan dalam hal agama atau etnis bisa memicu ketegangan yang dapat membawa perubahan dalam ideologi yang ada			

	<p>Konflik Politik dan Organisasi kemasyarakatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - konflik antar partai politik (persaingan dalam kontestasi dalam Pemilu/gesekan antar simpatisan atau pendukung) - Konflik antar Organisasi Kemasyarakatan <p>Konflik ekonomi dan sosial budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konflik perebutan sumber daya - Konflik fluktuasi kebutuhan pokok dan kelangkaan pupuk - Konflik kelangkaan pupuk subsidi - Konflik keagamaan - Konflik antar kelompok etnis <p>Rekomendasi kebijakan pimpinan daerah terkait ATHG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mewaspadaan Radikal kanan berkedok agama yang menggunakan bendera-bendera agama atau atas nama agama - Mewaspadaai radikal kiri (saham komunis) - Mewaspadai ormas/ LSM yang vocal terhadap Pemerintah - Mewaspadaai perubahan iklim berdampak menimbulkan bencana alam - Mewaspadaai gangguan pelaksanaan Pemilu - Mewaspadai Perselisihan internal partai politik - Konflik perselisihan pasca pemilu, pemilukada dan pilkades - Mewaspadaan Fluktuasi-kebutuhan pokok dan kelangkaan pupuk - Konflik Internal Ormas dan antar ormas - Konflik perguruan silat - Konflik keagamaan/antar- kelompok etnis - Maraknya penyalahgunaan Narkoba - Konflik Gangguan Kantibmas - Mewaspadaan Keberadaan orang asing dan ormas asing - Permasalahan ketenagakerjaan 		
--	---	--	--

2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Definisi Operasional : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi pemerintah melalui Implementasi sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai Evaluasi AKIP Tahun n $X = \frac{\text{Nilai AKIP yang diperoleh}}{\text{Nilai AKIP yang ditargetkan}} \times 100\%$	80.00	Dokumen SAKIP Bakesbangpol
----	---	--	---	-------	----------------------------



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JOMBANG**

1. Nama : **Drs. ANWAR,M.KP**
- NIP : NIP. 197104181992011004
- Jabatan : **Kepala Badan**
- Tugas pokok : melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
 6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik;
 7. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.	Persentase etnis/suku di kabupaten Jombang yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	$\frac{\sum \text{Jumlah etnis/suku yang telah mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan}}{\sum \text{Jumlah etnis/suku di Kabupaten Jombang}} \times 100$	Laporan pelaksanaan kegiatan bidang Ideologi , Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial ,Budaya ,Agama
		Persentase Kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter pancasila	$\frac{\sum \text{Jumlah Kaderisasi pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila}}{\sum \text{Jumlah kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter pancasila}} \times 100$	
2.	Meningkatkan partai politik yang melakukan kaderisasi di Kabupaten Jombang	Persentase partai politik yang melakukan kaderisasi	$\frac{\sum \text{Jumlah partai politik yang melakukan kaderisasi}}{\sum \text{Jumlah partai politik di Kabupaten Jombang}} \times 100$	Laporan pelaksanaan kegiatan bidang politik dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
3.	Peningkatan Ormas/LSM yang berperan aktif	Persentase Peningkatan Ormas/LSM yang berperan aktif	$\frac{\sum \text{Jumlah Ormas/LSM yang aktif}}{\sum \text{Jumlah Ormas/LSM yang aktif sebelum tahun n}} \times 100$	
4.	Meningkatkan Pembinaan kerukunan beragama di Kabupaten Jombang	Persentase kelompok agama yang mendapatkan pembinaan kerukunan beragama	$\frac{\sum \text{Jumlah kelompok agama yang mendapatkan pembinaan kerukunan beragama}}{\sum \text{Jumlah kelompok yang ada di Kabupaten Jombang}} \times 100$	Laporan pelaksanaan kegiatan bidang Ideologi , Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial ,Budaya ,Agama
5.	Tersusunnya laporan deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik sosial	Jumlah laporan deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik sosial	Jumlah laporan deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik sosial	Laporan Bidang Kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik

6.	Meningkatkan prosentase penunjang urusan pemerintah daerah	Prosentase rata rata capaian kinerja aparatur	$\frac{\sum \text{nilai kinerja pegawai}}{\sum \text{pegawai}} \times 100$	Laporan kinerja pegawai
----	--	---	--	-------------------------

KEPALA BAKESBANGPOL

Drs. ANWAR, M.KP

NIP. 197104181992011004

2. Nama : **SAMSUL HUDA, S.Sos,M.Si**
NIP : 19660515 199201 1 001
Jabatan : **SEKETARIS BAKESBANGPOL**
Tugas pokok : Merencanakan,melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi
Fungsi :

1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
2. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
6. Pengelolaan administrasi keuangan;
7. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
8. Pengelolaan administrasi aset;
9. Pengelolaan urusan rumah tangga;
10. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
11. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
12. Pengelolaan kearsipan;
13. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun secara aturan	$\frac{\sum \text{dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang terealisasi}}{\sum \text{dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang direncanakan}} \times 100$	Laporan pelaksanaan kegiatan Perencana Ahli Muda
2.	Mewujudkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan Gaji dan Tunjangan Tepat waktu	$\frac{\sum \text{pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Bakesbangpol yang terfasilitasi}}{\sum \text{pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Bakesbangpol yang direncanakan}} \times 100$	Laporan pelaksanaan kegiatan Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda
		Prosentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	$\frac{\sum \text{laporan keuangan SKPD yang tersusun}}{\sum \text{laporan keuangan SKPD yang direncanakan}} \times 100$	
3.	Mewujudkan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan administrasi kepegawaian Bakesbangpol	$\frac{\sum \text{Jumlah Pemenuhan administrasi kepegawaian Bakesbangpol}}{\sum \text{Jumlah administrasi kepegawaian Bakesbangpol}} \times 100$	Laporan Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4.	Mewujudkan administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	$\frac{\sum \text{paket sub kegiatan administrasi umum PD yang direalisasikan setiap bulan}}{\sum \text{paket sub kegiatan administrasi umum PD yang direalisasikan setiap bulan}} \times 100$	

			Σ paket sub kegiatan administrasi umum PD yang direncanakan dalam satu tahun	
5.	Mewujudkan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah	Prosentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah	Σ jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah PD yang terealisasi ----- x 100 Σ P jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah PD yang direncanakan	Laporan Kasubbag Umum dan Kepegawaian
6.	Mewujudkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Σ paket sub kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan PD yang terealisasi ----- x 100 Σ Paket sub kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan PD yang direncanakan	Laporan pelaksanaan kegiatan Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda
7.	Mewujudkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Σ barang milik daerah dalam kondisi baik ----- x 100 Σ barang milik Bakesbangpol yang dipelihara	Laporan pelaksanaan kegiatan Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda

3. Nama : **ERY INDRA TJAHYANINGSIH,SH**
 NIP : 197104021 1999032000
 Jabatan : **KEPALA SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
 Tugas pokok : Merencanakan,melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Administrasi Umum dan Kepegawaian
 Fungsi :

1. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Melaksanakan administrasi Kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier;
3. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapannya, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan karsipan;
4. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan serta pemeliharaan kantor;
5. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat;
6. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan;
7. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
8. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tatalaksana aparatur;
9. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) lingkup unit kerja; dan
10. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris

No	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya penyediaan komponen Instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor yang disediakan	\sum paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor yang disediakan pada tahun (n)	Laporan realisasi anggaran
2.	Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tdisediakan	\sum paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan disediakan pada tahun (n)	Laporan realisasi anggaran

3.	Terwujudnya penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	\sum paket bahan logistik kantor yang disediakan pada tahun (n)	Laporan realisasi anggaran
4.	Terwujudnya penyediaan barang cetak dan pengandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	\sum paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan pada tahun (n)	Laporan realisasi anggaran
5.	Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	\sum dokumen bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan pada tahun (n)	Laporan realisasi anggaran
6.	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	\sum laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pada tahun (n)	Laporan realisasi anggaran
7.	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	\sum paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya pada Tahun (n)	Laporan realisasi anggaran

4. Nama : **YUNI SULISTYORINI, S.Sos**
 NIP : 198106122005012012
 Jabatan : **Perencana Ahli Muda, Sub Koordinator Sub Substansi Penyusunan Program dan Evaluasi**
 Tugas pokok : Merencanakan,melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan evaluasi pokok
 Fungsi :

1. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran;
2. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
3. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran;
4. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian monitoring, evaluasi tentang pelaporan kinerja;
5. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya;
6. Mengelola, mengembangkan data dan 16edung informasi;
7. Melaksanakan 16edung16se, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Σ dokumen perencanaan perangkat Daerah yang tersusun pada tahun (n)	Laporan Perencana Ahli Muda, Sub Koordinator Sub Substansi Penyusunan Program dan Evaluasi
2.	Terlaksannya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Σ laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun pada tahun (n)	Laporan Perencana Ahli Muda, Sub Koordinator Sub Substansi Penyusunan Program dan Evaluasi

5. Nama : **TITIS PUSPITORINI, S.AP**
 NIP : 198505212011012007
 Jabatan :
 Tugas : Merencanakan,melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Keuangan dan aset pokok
 Fungsi :

1. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
2. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
3. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran;
4. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
5. Melaksanakan penatausahaan, pengelolaan dan pelaporan 17edun;
6. Melaksanakan peningkatan kesejahteraan Pegawai; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

No	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Σ pembayaran gaji dan tunjangan ASN dilingkup Bakesbangpol yang terfasilitasi pada tahun (n)	Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda, Sub Koordinator Sub Substansi Keuangan dan aset
2.	Tersusunnya dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD pada tahun (n)	Σ dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD pada tahun (n)	Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda, Sub Koordinator Sub Substansi Keuangan dan aset

3.	Terlaksannya Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir Tahun SKPD	Σ laporan keuangan akhir Tahun SKPD pada Tahun (n)	Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda, Sub Koordinator Sub Substansi Keuangan dan aset
4.	Terlaksannya Koordinasi dan penyusunan laporan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun	Σ laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD pada tahun (n)	Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda, Sub Koordinator Sub Substansi Keuangan dan aset
5.	Terlaksannya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Σ unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan pada tahun (n)	Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda, Sub Koordinator Sub Substansi Keuangan dan aset
6.	Terwujudnya penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik yang disediakan	Σ laporan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik yang disediakan pada tahun (n)	Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda, Sub Koordinator Sub Substansi Keuangan dan aset
7.	Terwujudnya penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan , dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Jumlah kendaraaan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Σ kendaraaan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya pada tahun (n)	Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda, Sub Koordinator Sub Substansi Keuangan dan aset
8.	Terwujudnya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Σ kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya pada tahun (n)	Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda, Sub Koordinator

	perizinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		Sub Substansi Keuangan dan aset
9.	Terlaksananya pemeliharaan /rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Σ Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dpelihara/direhabilitasi pada tahun (n)	Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda, Sub Koordinator Sub Substansi Keuangan dan aset
10.	Terlaksannya pemeliharaan /rehabilitasi/sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Σ Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dpelihara/direhabilitasi pada tahun (n)	Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda, Sub Koordinator Sub Substansi Keuangan dan aset

6. Nama : **ARFAN BUDI SUCAHYO, SE, M.KP**

NIP : 19761006 199703 1 003

Jabatan : Ka. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama

Tugas pokok : Merencanakan,melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan

Fungsi :

1. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;

5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Tersusunnya Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase rumusan kebijakan bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang diusulkan	$\frac{\sum \text{rumusan kebijakan bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang disetujui}}{\sum \text{rumusan kebijakan bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang diusulkan}} \times 100$	Laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama
		Jumlah etnis/suku di kabupaten jombang yang dikuatkan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	$\sum \text{etnis/suku di kabupaten jombang yang dikuatkan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan}$	
		Jumlah pemuda kader Kabupaten /Kota yang lolos seleksi sebagai Paskibraka	$\sum \text{Jumlah pemuda kader Kabupaten /Kota yang lolos seleksi sebagai Paskibraka}$	

2.	Tersusunnya Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya	Prosentase rumusan kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya yang diusulkan	$\frac{\sum \text{rumusan kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya yang disetujui}}{\sum \text{rumusan kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya yang diusulkan}} \times 100$	Laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama
		Persentase kegiatan kerukunan umat beragama yang terlaksana	$\frac{\sum \text{kegiatan kerukunan umat beragama yang terlaksana}}{\sum \text{kegiatan kerukunan umat beragama yang direncanakan}} \times 100$	
		Jumlah ASN yang mendapatkan tes narkoba	$\sum \text{ASN yang mendapatkan tes narkoba}$	

7. Nama : **SUDARMADJI TRIONO, SH**
NIP : 19700520 199803 1 014
Jabatan : **Analis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Sub Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan**
Tugas pokok : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
Fungsi :

1. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
2. Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
3. Melaksanakan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
4. Melaksanakan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
6. Melaksanakan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama

No	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan yang disusun	Σ Dokumen Program Kerja di Bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan yang disusun pada Tahun N	Laporan pelaksanaan Analis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Sub Substansi Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
2.	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan	Σ orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan pada Tahun N	
3.	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan	Σ laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan Tahun N	
4.	Terlaksannya Pembinaan terhadap aktifitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	laporan hasil pembinaan aktifitas kepaskibrakaan dan laporan hasil pembinaan purnapaskibraka	Σ laporan hasil pembinaan aktifitas kepaskibrakaan dan laporan hasil pembinaan purnapaskibraka	

8. Nama :
NIP :
Jabatan : **Analis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Sub. Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosbud dan Agama**
Tugas pokok : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
Fungsi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan Program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
3. Melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
4. Melaksanakan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
6. Melaksanakan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama.

No	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Tersusunnya Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Tersusun	Σ Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Tersusun tahun N	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Analis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Sub. Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosbud dan Agama
2.	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Σ orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah pada tahun N	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Analis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Sub. Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosbud dan Agama
3.	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,	Σ Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Analis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Sub. Substansi Ketahanan

	Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah pada tahun N	Ekonomi, Sosbud dan Agama
--	---	--	--	---------------------------

9. Nama : **TONY PRASETYO W,ST, M.Si**
NIP : 19700416199803 1 010
Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Tugas pokok : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik
Fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi Pimpinan Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan bidangnya

No	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Tersusunnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<p>1. Prosentase rumusan kebijakan bidang Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang diusulkan</p> <p>2. Jumlah laporan rekapitulasi hasil pemantauan perkembangan situasi dan kondisi kamtibnas di Kabupaten</p>	$\frac{\sum \text{bidang Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang diusulkan yang disetujui}}{\sum \text{bidang Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang diusulkan}} \times 100$ $\sum \text{laporan rekapitulasi hasil pemantauan perkembangan situasi dan kondisi kamtibnas di Kabupaten}$	Laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional

10. Nama : KATONO SUGIARTO,SH, M.Si
 NIP : 19671107 1990031008
 Jabatan : **Analis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Sub Substansi Penanganan Konflik**
 Tugas pokok :
 a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja, di bidang penanganan konflik;
 b. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang penanganan konflik;
 c. Melaksanakan kebijakan di bidang penanganan konflik;
 d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait atau lembaga terkait dibidang penanganan konflik;
 e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang penanganan konflik;
 f. Melaksanakan pelaporan di bidang penanganan konflik; dan
 g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sesuai dengan bidangnya.

No	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Tersusunnya Program kerja di Bidang Kewaspadaan dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan peratasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	Jumlah dokumen program kerja di Bidang Kewaspadaan dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan peratasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah yang tersusun	Σ dokumen program kerja di Bidang Kewaspadaan dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan peratasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah yang tersusun pada tahun N	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Analis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Sub Substansi Penanganan Konflik

2.	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	Σ Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah pada tahun N	Analis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Sub Substansi Penanganan Konflik
----	---	---	---	--

11. Nama : **KANIRAN, SH**
NIP : 196906051993021006
Jabatan : **Analis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Sub. Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen**
Tugas pokok :
a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
b. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan
c. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
d. Melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
e. Melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
g. Melaksanakan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
h. Melaksanakan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; dan

No	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik	Jumlah laporan hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah pada tahun N	Σ laporan hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah pada tahun N	Laporan pelaksanaan Analis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Sub. Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen
2.	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Σ Dokumen Hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun N	Laporan pelaksanaan Analis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Sub. Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen

12. Nama : **ASHARI,S.KM, M.KP**
NIP : 196802051989031009
Jabatan : Kepala Bidang politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakakan
Tugas Pokok : Merencanakan,melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemasyarakatan asing.
Fungsi :
a. Penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan

situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan bidang tugasnya.

No	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Tersususnnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	<p>1. Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang diusulkan</p> <p>2. Persentase partai politik yang mendapatkan fasilitasi bantuan pendidikan politik</p>	$\frac{\sum \text{rumusan kebijakan bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang disetujui}}{\dots} \times 100$ $\frac{\sum \text{rumusan kebijakan bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang diusulkan}}{\dots}$ $\frac{\sum \text{partai politik yang mendapatkan fasilitasi bantuan pendidikan politik}}{\sum \text{partai politik yang direncanakan mendapatkan fasilitasi bantuan pendidikan politik}} \times 100$	Laoran Pelaksanaan Kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

2.	Tersusunnya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1. Persentase rumusan kebijakan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang diusulkan	$\frac{\sum \text{rumusan kebijakan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang disetujui}}{\sum \text{rumusan kebijakan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang diusulkan}} \times 100$	Laoran Pelaksanaan Kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
		2. Jumlah organisasi kemasyarakatan aktif yang dibina	$\sum \text{organisasi kemasyarakatan aktif yang dibina}$	

13. Nama : **HADI KUSHARTANTO, S. Sos**
NIP : 196707121992021002
Jabatan : **Analis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Sub Substansi Politik Dalam Negeri**
Tugas pokok :
a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
b. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
c. Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
d. Melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
f. Melaksanakan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

No	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Tersusunnya program kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan PartaiPolitik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan PartaiPolitik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun	Σ dokumen program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan PartaiPolitik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun pada tahun N	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Analis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Sub Substansi Politik Dalam Negeri
2.	Terlaksannya kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi di Daerah	Σ orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi di Daerah pada Tahun N	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Analis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Sub Substansi Politik Dalam Negeri

3.	Terlaksannya monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Σ laporan hasil monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik pada Tahun N	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Analis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Sub Substansi Politik Dalam Negeri

14. Nama :
NIP :
Jabatan : **Analis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordiantor Sub. Substansi Organisasi Kemasyarakatan**
Tugas pokok :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- b. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- d. Melaksanakan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- f. Melaksanakan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya

No	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Tersusunnya program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah yang disusun	Σ program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah yang disusun pada Tahun N	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Analis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordiantor Sub. Substansi Organisasi Kemasyarakatan
2.	Terlaksannya kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah	Σ orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah pada Tahun N	
3.	Terlaksannya monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah laporan hasil monitoring hasil evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Σ laporan hasil monitoring hasil evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah pada Tahun N	

15. Nama : **ENI FATMAWATI, S.Sos**
 NIP : 19891201201502002
 Jabatan : PENATA LAPORAN KEUANGAN
 Tugas pokok : Mengelola administrasi keuangan dan membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran, dan keadaan kas sebagai bahan pertanggungjawaban

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	SUMBER DATA
Menghimpun dokumen laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan per bulan	Σ laporan keuangan per bulan	Transaksi Keuangan, SPJ
	Jumlah laporan keuangan per tribulan	Σ laporan keuangan per tribula	
	Jumlah laporan keuangan pertribulan	Σ laporan keuangan pertribulan	
	Jumlah laporan keuangan akhir Tahun anggaran dan CLAK	Σ laporan keuangan akhir Tahun anggaran dan CLAK	

17. Nama : **SOSI ANDRIJANI**
 NIP : 19750310200912002
 Jabatan : PENGELOLA
 Tugas pokok : - Mengelola dan mengurus barang milik daerah
 - Melakukan administrasi surat masuk dan surat keluar, menyampaikan disposisi pimpinan kepada pihak terkait

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Menghimpun dokumen Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah surat keluar dan masuk - Jumlah surat masuk ke bidang berdasar disposisi pimpinan - Jumlah surat keluar yang akan ditandatangani pimpinan - Jumlah dokumen-dokumen pelaporan - Jumlah daftar kebutuhan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya - Jumlah laporan persediaan barang habis pakai - Jumlah pengadaan ATK - Jumlah pengadaan alat dan bahan kebersihan kantor - Jumlah naskah surat-surat kepegawaian 	<ul style="list-style-type: none"> - Σ surat keluar dan masuk - Σ surat masuk ke bidang berdasar disposisi pimpinan - Σ surat keluar yang akan ditandatangani pimpinan - Σ dokumen-dokumen pelaporan - Σ daftar kebutuhan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya - Σ laporan persediaan barang habis pakai - Σ pengadaan ATK - Σ pengadaan alat dan bahan kebersihan kantor - Σ Jumlah naskah surat-surat kepegawaian 	Agenda Surat Masuk dan Keluar, KIR dan KIB , data kepegawaian

18. Nama : **EENG MISBAKHUDDIN,SE**
 NIP : 199009122015051001
 Jabatan : PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN
 Tugas pokok : Membantu penyusunan program, evaluasi dan pelaporan

KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Pengadministrasian perencanaan/laporan program/kegiatan	- Jumlah input dan mengolah hasil penyusunan rencana program dan kegiatan	- Σ input dan mengolah hasil penyusunan rencana program dan kegiatan	RKA, RENJA , RENSTRA
	- Jumlah mengetik hasil kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen sungram	- Σ mengetik hasil kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen sungram	
	- Jumlah mengetik hasil koordinasi perencanaan program,kegiatan dan anggaran	- Σ mengetik hasil koordinasi perencanaan program,kegiatan dan anggaran	
	- Jumlah mengetik dan menyimpan hasil koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan kegiatan	- Σ mengetik dan menyimpan hasil koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan kegiatan	
	- Jumlah mengetik dan mengelola hasil kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring ,evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan	- Σ mengetik dan mengelola hasil kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring ,evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan	
	- Jumlah mengetik dokumen LKj	- Σ mengetik dokumen LKj	
	- Jumlah pengumpulan data dan mengetik RENJA	- Σ engumpulan data dan mengetik RENJA	
	- Jumlah mengetik evaluasi terhadap hasil RENJA OPD	- Σ mengetik evaluasi terhadap hasil RENJA OPD	
	- Jumlah mengetik dan mengelola data akhir terkait SAKIP	- Σ mengetik dan mengelola data akhir terkait SAKIP	

19. Nama : **WAHYUDI EKO SUDRAJAT**
 NIP : 197805092009011004
 Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM
 Tugas pokok : Mendistribusikan dokumen pendukung administrasi kepegawaian/keuangan

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI /RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Menghimpun/mendistribusikan dokumen pendukung administrasi kepegawaian/keuangan	Jumlah menyediaan surat keluar yang ditanda tangani Sekda/asisten/Bupati	Σ menyediaan surat keluar yang ditanda tangani Sekda/asisten/Bupati	Dokumen Surat Masuk dan Keluar dan Dokumen SPJ
	Jumlah Menggandakan berkas-berkas (surat,SPJ, dokumen)	Σ Menggandakan berkas-berkas (surat,SPJ, dokumen)	
	Jumlah Mendistribusikan surat-surat keluar Bakesbagpol (kurir)	Σ Mendistribusikan surat-surat keluar Bakesbagpol (kurir)	

20. Nama :
 NIP :
 Jabatan : **ANALIS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT**
 Tugas pokok : Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan dan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait dan lembaga terkait

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Menghimpun Dokumen pendukung kegiatan bidang	Jumlah Fasilitasi kegiatan FKDM dalam rangka penyusunan rekomendasi pencegahan dan penanganan Konflik di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Σ kegiatan FKDM yang terfasilitasi	DPA, ANGKAS ,Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Dokumen Rencana Aksi
	Jumlah kegiatan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Σ dokumen program Kerja di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	
	Jumlah Mendokumentasikan, mengagenda dan mengarsip surat masuk dan surat keluar di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Σ surat masuk dan surat keluar di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	
	Jumlah kegiatan penggalangan masyarakat berkaitan dengan potensi ATHG	Σ kegiatan penggalangan masyarakat	

	Jumlah Mengumpulkan bahan penyusunan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial bersama Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Jombang	Σ Rencana Aksi Penanganan Konflik yang tersusun	
	Jumlah Mengetik dan menyusun Laporan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Jombang	Σ laporan Rencana Aksi yang tersusun	
	Jumlah Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait di Bidang Kewaspadaan Dini Intelkam, Bina masyarakat, Penanganan Konflik Sosial, Orang Asing dan Ormas Asing di Kabupaten Jombang	Σ bahan koordinasi	
	Jumlah Menyiapkan administrasi kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat (TKD) Puskominfo Kabupaten Jombang	Σ Rakor Pimpinan Daerah	
	Jumlah Mendokumentasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Σ monitoring	

21. Nama : **ZUMROTUL ULFA ,S.Sos**
 NIP : 197511022007012000
 Jabatan : Analis Organisasi Masyarakat
 Tugas Pokok : Menganalisa kegiatan Organisasi Masyarakat

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Menganalisa pengajuan rekomendasi ijin penelitian	Jumlah Mengoreksi kelengkapan data ijin penelitian	Σ Mengoreksi kelengkapan data ijin penelitian	DPA, ANGKAS ,Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Dokumen Rencana Aksi
	Jumlah draft SK Tim Pengawasan ormas dan SK Hibah yg diketik	Σ draft SK Tim Pengawasan ormas dan SK Hibah yg diketik	
Meneliti/ Menyusun dokumen pencairan hibah di lingkup subbidang organisasi masyarakat	Jumlah berkas usulan hibah ormas	Σ berkas usulan hibah ormas	
menyusun laporan kegiatan sosialisasi/Bimtek organisasi kemasyarakatan	Jumlah laporan kegiatan sosialisasi/Bimtek organisasi kemasyarakatan	Σ laporan kegiatan sosialisasi/Bimtek organisasi kemasyarakatan	

22. Nama : **DWI YUNI SUHARSONO**
 NIP : 197306082008011015
 Jabatan : Pengadministrasi Umum
 Tugas Pokok : Mengadministrasi dokumen bagian umum dan kepegawaian

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Menganalisa pengajuan rekomendasi ijin penelitian	Jumlah Mengoreksi kelengkapan data ijin penelitian	Σ Mengoreksi kelengkapan data ijin penelitian	DPA, ANGKAS ,Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Dokumen Rencana Aksi
	Jumlah draft SK Tim Pengawasan ormas dan SK Hibah yg diketik	Σ draft SK Tim Pengawasan ormas dan SK Hibah yg diketik	
Meneliti/ Menyusun dokumen pencairan hibah di lingkup subbidang organisasi masyarakat	Jumlah berkas usulan hibah ormas	Σ berkas usulan hibah ormas	
menyusun laporan kegiatan sosialisasi/Bimtek organisasi kemasyarakatan	Jumlah laporan kegiatan sosialisasi/Bimtek organisasi kemasyarakatan	Σ laporan kegiatan sosialisasi/Bimtek organisasi kemasyarakatan	

23. Nama : **IDZHAR NURCAHYO, S.Tr.IP**
 NIP : 200001312022081002
 Jabatan : Analis Hubungan Antar Lembaga
 Tugas Pokok : Menganalisa kegiatan Hubungan Antar Lembaga Eksekutif dan Legislatif

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Menyusun Draft SK Tim dan SK Hibah	Jumlah draft SK Tim PemantaunPerkembangan Politik dan SK Hibah yang diketik	Σ draft SK Tim PemantaunPerkembangan Politik dan SK Hibah yang diketik	DPA, ANGKAS ,Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Dokumen Rencana Aksi
Meneliti/Menyusun dokumen pencairan hibah di lingkup subbidang Politik Dalam Negeri	Jumlah berkas usulan hibah politik	Σ berkas usulan hibah politik	
Menginput data RKA bidang Politik Dalam Negeri	Jumlah laporan data RKA	Σ laporan data RKA	
Menyusun laporan kegiatan sosialisasi Pendidikan politik	Jumlah laporan kegiatan sosialisasi Pendidikan politik	Σ laporan data RKA	